

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKSESIBILITAS TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI
KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Provinsi Riau)**

**Yesi Ramadhani
Taufeni Taufik
Lila Anggraini**

Email : yesi_ramadhani29@yahoo.com

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Riau**

ABSTRACT

This study aims to determine examine whether the accessibility of local financial reports and presentation of them influence the usefulness of local financial information by the stakeholders. The population in this study is 580 people usefulness financial reports in Riau Provincial Government is DPRD, BPK, LSM. Samples in this study is 85 responden has already accomplish sample criterion. Data collection techniques are used by distributing questionnaires.

The results showed that the effect of persentation of local financial reports on the usefulness of local financial information. This can be seen from the significant value of $0.040 < 0.05$. Accessibility on the usefulness of local financial information. Evidenced by the significant value of $0.000 < 0.05$.

Adjusted R Square value of 0.371. this means that 37.10% of usefulness of local financial information variables can be explained by the presentation of local financial reports and accessibility. While the remainder is equal to 62.90% is explained by other variables outside the investigated.

Keywords: local financial reports, accessibility, local financial information

1.1 Latar Belakang

Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah

dalam rangka melaksanakan amanat rakyat, Mulyana, (2006) dalam Bandariy, (2011). Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, Mardiasmo, (2002) dalam Bandariy (2011).

Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, Mardiasmo, (2002) dalam Bandariy (2011). Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif.

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi,

sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004-2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk (BPK, 2008). Hal ini disesalkan karena buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tersebut meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Isu rendahnya transparansi dan akuntabilitas semakin dipertegas dengan adanya laporan audit yang disampaikan oleh BPK yang menyatakan bahwa mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia masih mendapatkan penilaian buruk Kompas (2008) dalam Rohman (2009). Pernyataan tersebut didasarkan pada kembalinya BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2007. Penilaian yang buruk ini juga diberikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat. Bahkan selama empat tahun berturut-turut, sampai tahun 2007, opini disclaimer ini diberikan untuk laporan keuangan pemerintah pusat.

Alasan masih banyaknya pemerintah daerah yang dinilai buruk dalam melaporkan keuangannya, karena belum adanya UU yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara rinci. Kepala BPK, Anwar Nasution menegaskan pemerintah daerah yang mendapatkan opini buruk dalam laporan keuangannya harus memperbaiki dan membenahi berbagai kelemahannya (BPK, 2008)

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi

prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond, (2002) dalam Aliyah dan Anhar (2012) dalam Bandariy (2011), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Ratna Amalia Safitri (2009) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara

langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian pelaporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya adalah penyajian pelaporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006 dalam Sande, 2013). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan (Arfianti 2011). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah penting untuk diteliti mengingat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang diindikasikan melalui seberapa pentingnya penggunaan informasi keuangan daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses oleh publik, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Provinsi Riau)**

2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah : Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas berpengaruh terhadap manfaat informasi keuangan daerah?

1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Mengkaji dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan daerah.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk salah satu syarat mengikuti ujian skripsi dan oral komprehensif sarjana lengkap pada fakultas ekonomi universitas riau
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari pentingnya laporan keuangan daerah sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya pemerintah daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah secara lebih baik.
4. Bagi masyarakat sebagai stakeholder eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
5. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan daerah.

2.TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Laporan Keuangan Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah, sekarang ini pada setiap daerah dibentuk Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana Perangkat Daerah ini juga disebut dengan unit-unit kerja.

Sedangkan untuk komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01, alinea 14, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari pelaporan keuangan ini berdasarkan ketetapan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01, alinea 9, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos pos berikut : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

2.2.Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Ada beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 alinea 36 (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010) dinyatakan bahwa pengguna atau pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
4. Pemerintah

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002 dalam Bandaiy 2011).

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi

keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan.

Penggunaan informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di luar manajemen internal pmda terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan akses yang diberikan.

2.3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005). Menurut Governmental accounting Standard Board (GASB, 1998) tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik;
2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

1. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

2. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk

itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.4. Aksesibilitas Laporan Keuangan.

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009).

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Peggy Sande (2013), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002 dalam Peggy Sande 2013). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh

media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004, dalam Mulyana, 2006 dalam Peggy Sande 2013).

Menurut Yani (2009) dalam Peggy Sande (2013), pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah.

Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

SIKD adalah system informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi:

1. Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan

secara terbuka melalui media massa.

2. Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah
3. *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

2.5 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010) dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 2002 dalam Rohman 2009).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perwujudan akuntabilitas publik belum tercapai sesuai harapan pengguna informasi. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu untuk menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka kepada publik. Faktor utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan penyajian

laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bagaimana penilaian tanggung jawab itu selanjutnya kita kembalikan lagi kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara sukarela. Hasil *feedback* dari pengguna informasi atas penyajian laporan keuangan inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung..

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

2.5.2 Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah.

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka

yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley *et al.*, 1990, dalam Rohman, 2009).

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak hanya disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibilitas pada pengguna potensial (Jones *et al.*, 1985 dalam Mulyana 2006). Oleh karena itu, pemerintah daerah mendapat motivasi agar mampu menyajikan laporan keuangan tidak hanya kepada DPRD tetapi juga harus menyajikan fasilitas kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan serta ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka

dituangkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Pemerintahan Provinsi Riau. Sedangkan waktu perencanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari – April 2014.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan pemerintah provinsi Riau, yaitu anggota DPRD, anggota BPK dan anggota LSM sebanyak 580 orang. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Adapun salah satu kriteria yang menjadi acuan peneliti dalam penentuan populasi adalah sebagai berikut :

1. Anggota DPRD adalah pengguna utama aktual laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mulyana, 2006). Anggota DPRD yang dipilih adalah anggota badan anggaran DPRD Provinsi Riau dan staf bagian keuangan DPRD Riau.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006: 56). Penyampelan atas responden (pengguna laporan keuangan) dilakukan dengan teknik *proporsionate stratified random sampling*; yakni, suatu teknik pemilihan sampel yang apabila populasinya tidak (heterogen), yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kategori yang berbeda. Dalam

menentukan jumlah besarnya sampel dari total populasi sebanyak 85 orang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari responden yang penulis gunakan, yaitu anggota DPRD yaitu anggota badan anggaran DPRD Provinsi Riau dan staf bagian keuangan DPRD Riau, Badan Pemeriksa Keuangan dipilih karena mereka bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa penggunaan uang daerah telah dilakukan sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku (Ulum, 2004). Pegawai BPK yang dipilih adalah pegawai yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dan LSM sebagai perwakilan masyarakat.

3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Penyajian laporan keuangan daerah (Variabel Independen)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan daerah diukur menggunakan instrumen kuesioner yang menggunakan 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010)

b. Aksesibilitas laporan keuangan

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Aksesibilitas laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner yang menggunakan indikator

yaitu data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. (UU No.33 Tahun 2004)

c. Penggunaan informasi keuangan daerah

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan ini adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Penggunaan informasi keuangan daerah diukur menggunakan kuisisioner dengan indikator : transparansi pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah , dengan skala pengukuran respon yaitu 5 (lima) poin skala likert, (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

3.5. Pengujian Data

3.5.1. Uji validitas

Uji validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk mengetahui validitas konstruk (Chenhall & Morris, 1986).

3.5.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai *cut off* untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *cronbach alpha* lebih dari 0.60 (Nunnally, 1978).

3.6. Metode Analisis Data

Setelah data yang didapat dianggap valid dan reliable, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu software SPSS versi 17. Seluruh data yang sudah

terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan rumus statistika.

3.6.1. Analisis Regresi Berganda

Metode Analisis Berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variable independen (Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan, dengan variable dependen (Penggunaan Informasi Keuangan Daerah). Untuk menguji hipotesis diatas, digunakan model sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a = konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi

X_1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X_2 = Aksesibilitas laporan keuangan

Y = Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

E = Standar Error

3.7. Pengujian Asumsi Klasik

3.7.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai kontribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

3.7.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Diasumsikan bahwa masing-masing variabel x tidak saling berkorelasi linear.

3.7.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

3.7.4. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambar dalam spesifikasi model regresi, misalnya perubahan struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat keakuratan data. Dengan kata lain, heterokedastisitas terjadi jika residual tidak memiliki varians yang konstan (Pratisto 2004:149 dalam Ranti Oktari 2011).

3.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Prayitno, 2012). Hipotesis pertama (H_1) dari penelitian ini adalah Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi. Hipotesis kedua (H_2) dari penelitian ini adalah Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi.

3.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Uji Validitas Data

Hasil Uji validitas data menyatakan bahwa korelasi antara masing-masing indikator atau item untuk variabel Penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Penggunaan informasi keuangan daerah diatas 0.30 yang artinya semua variabel diatas memenuhi syarat valid.

4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada penggunaan informasi keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas yaitu masing-masing 0.897, 0.753, dan 0.897 > 0.60. Hal ini berarti bahwa penggunaan informasi keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas adalah reliabel.

4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa perhitungan nilai *Tolerance* penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap penggunaan informasi keuangan daerah adalah 0.949. Kemudian nilai VIF sebesar 1.054. Hal ini berarti tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *Tolerance* \leq 0.1 dan VIF \geq 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas atau bebas dari multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson tabel di atas, nilai DW untuk dua variabel independen adalah 1.631, yang berarti nilai DW berada diantara -2

sampai +2 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian ini.

4.3.4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Tampilan gambar pada hasil uji heterokedastisitas diatas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk digunakan.

4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda

Pada hasil analisis regresi berganda yaitu:

1. Penyajian laporan keuangan terhadap Penggunaan informasi keuangan daerah sebesar 0.156 dengan nilai signifikan $0.040 < 0.05$ berarti signifikan. Hal ini berarti apabila penyajian laporan keuangan ditingkatkan, maka penggunaan informasi keuangan daerah akan meningkat sebesar 15.60%
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan informasi keuangan daerah sebesar 0.652 dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$ berarti signifikan. Hal ini berarti apabila aksesibilitas laporan keuangan ditingkatkan, maka penggunaan informasi keuangan daerah akan meningkat sebesar 65.20%

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Penyajian laporan keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Hipotesis pertama yang diajukan adalah Pengaruh Penyajian laporan keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Nilai t-hitung Penyajian laporan keuangan adalah 2.086 dengan nilai signifikansi

sebesar 0.040. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak atau Hipotesis pertama diterima. Karena jika nilai signifikan $0.040 < 0.05$, maka Hipotesis pertama diterima yaitu terdapat pengaruh Penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat Penyajian laporan keuangan maka semakin tinggi pula penggunaan informasi keuangan daerah yang dimiliki.

Penelitian ini mendukung penelitian Collins *et al* (1991) yang melakukan penelitian tentang akses pihak eksternal terhadap informasi keuangan yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti adanya pihak eksternal yang dapat memiliki akses terhadap informasi keuangan pemerintah. Hal ini merupakan gambaran nyata yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum menjadi public good.

4.5.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Hipotesis Kedua yang diajukan adalah Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah.

Nilai t-hitung aksesibilitas laporan keuangan adalah 6.218 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak atau Hipotesis kedua diterima. Karena jika nilai signifikan $0.000 < 0.05$, maka Hipotesis kedua diterima yaitu terdapat pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian Anondo (2004) melakukan penelitian yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilitas publik.

4.6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika dalam proses mendapatkan nilai R^2 yang tinggi adalah baik, tetapi jika nilai R^2 rendah tidak berarti model regresi jelek.

Berdasarkan perhitungan nilai tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.386. Hal ini menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan secara simultan memberikan pengaruh sebesar 38.60% terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan informasi keuangan daerah melalui. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian terbukti bahwa Hipotesis pertama diterima. Dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesisnya bahwa t-hitung Penyajian laporan keuangan adalah 2.086 dengan nilai signifikansi sebesar 0.040. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak atau Hipotesis pertama diterima. Karena jika nilai signifikan $0.040 < 0.05$, yaitu terdapat pengaruh Penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
2. Dari hasil pengujian terbukti bahwa Hipotesis kedua diterima. Dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis bahwa nilai t-hitung Penyajian laporan keuangan adalah

6.218 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak atau Hipotesis kedua diterima. Karena jika nilai signifikan $0.000 < 0.05$, yaitu terdapat pengaruh Penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap Penggunaan informasi keuangan daerah. Maka penulis memberikan saran, rekomendasi atau implikasi sebagai berikut :

A. Rekomendasi atau implikasi kebijakan

1. Pemerintah Provinsi Riau sebaiknya mengadakan evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas keuangan, karena dengan penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta aksesibilitas laporan keuangan yang mudah dilihat, maka penggunaan informasi keuangan daerah akan berdampak positif.
2. Pemerintah Provinsi Riau sebaiknya memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melakukan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pegawai dengan inovasi yang tinggi akan memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan dan meningkatnya penggunaan informasi keuangan.

B. Saran bagi peneliti yang akan datang

1. Peneliti yang akan datang agar memperluas variabel yang diteliti, selain variabel yang diteliti sekarang
2. Peneliti yang akan datang juga dapat menggunakan metode *interview* selain dengan kusioner untuk mendapatkan data yang lebih kredibel
3. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada pengguna informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan lebih banyak lagi karena dengan lingkup wilayah yang lebih luas. Apabila diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandary,Himmah, 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali,Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Tegal: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kawedar,Warsito. Rohman, dan Sri Handayani. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah Semarang*: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo,(2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik:

Suatu Sarana Good
Governance. *Jurnal
Akuntansi Pemerintah*, Vol.2,
No.11, pp. 1-17.

- Mulyana, Budi, (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, pp, 65-78.
- Rohman, Abdul (2007). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah). *Jurnal MAKSI*. Vol.7 NO.2. Hal. 105-220. Agustus 2007.
- Sande, Peggy. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Universitas Negeri Padang.